

**DAMPAK KORUPSI TERHADAP BERBAGAI BIDANG
KORUPSI; PENYEBAB UTAMA RENDAHNYA IPM INDONESIA**

Rameyza Ellya Nadine
rameyzaellyaa@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah mengancam semua aspek kehidupan sosial, nasional, dan negara. Korupsi juga telah membawa kerugian materil yang sangat besar bagi keuangan negara terkait ekonomi, masyarakat, dan budaya. Selain itu, tindakan korupsi telah memicu perubahan sosial yang tak terhindarkan akibat kejahatan. Perhatian utama dalam artikel ini adalah untuk memahami dan menganalisis perkembangan sosial yang berkaitan dengan tindakan korupsi. Artikel ini selanjutnya menyoroti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak tersebut terhadap masyarakat yang disebabkan oleh adanya tindakan korupsi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat analitis preskriptif, melalui pendekatan konseptual, undang-undang, dan kasus dalam menilai partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi mendorong penurunan kesejahteraan sosial, memaksa masyarakat luas untuk menderita akibat perilaku tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para pelaku korupsi. Dalam hal ini, pemerintah didorong untuk melakukan upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pencegahan tindakan korupsi. Upaya ini mencakup arahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, langkah-langkah tindakan, dan gerakan prosedural yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengatasi tindakan korupsi (Sari, N. P., & Putra, I. M. 2019).

Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Indonesia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi persoalan penting. Meskipun mengalami peningkatan, IPM Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Salah satu faktor utama yang diduga menjadi penyebab kondisi ini adalah tingginya tingkat korupsi. Korupsi menghambat efektivitas penggunaan anggaran negara dan mengurangi kualitas layanan publik, sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat ((Pratama, A. 2023).

Dalam konteks pembangunan manusia, korupsi memiliki efek domino yang luas. Penyalahgunaan anggaran publik menyebabkan program-program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun dan tidak merata, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih jauh lagi, korupsi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya menghambat peningkatan indikator IPM secara menyeluruh. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang layak menjadi terbatas, maka peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya juga semakin kecil.

2. PERNYATAAN OPINI / TESIS

Topik korupsi sebagai penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia penting untuk dibahas karena menyangkut langsung kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari. IPM mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan, sehingga jika nilainya belum optimal, berarti masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan dasar secara layak. Dalam kenyataannya, masalah ini tidak bisa dilepaskan dari praktik korupsi yang masih terjadi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering kali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga berdampak pada kurangnya fasilitas pendidikan, terbatasnya layanan kesehatan, dan ketimpangan kesejahteraan. Kondisi ini pada akhirnya menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara korupsi dan IPM menjadi penting, karena dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang akar permasalahan serta mendorong upaya perbaikan ke arah pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan (Amalia, R., & Syafitri, Y. 2020).

3. ARGUMEN ILMIAH

Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktik korupsi menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap keuangan negara (Astuti & Chariri, 2015). Salah satu pemimpin negeri ini, Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal sebagai Ahok, pernah mengatakan bahwa, “Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu, cukup dengan tidak korupsi saja itu sudah cukup menolong negara kita.” Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa korupsi merupakan

bentuk nyata yang dapat merusak peradaban bangsa, terutama dalam sektor perekonomian Indonesia.

Korupsi tampaknya telah mengakar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa praktik korupsi telah merajalela. Ironisnya, tindakan ini tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga secara kolektif dalam bentuk perampasan keuangan negara. Hal ini mencerminkan rendahnya moralitas dan hilangnya rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tercatat sebesar 34, menurun dari tahun 2021 yang mencapai angka 38. Secara peringkat global, Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara di dunia. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan serius terkait korupsi.

3.1. Faktor Utama Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu alasan mengapa korupsi menjadi faktor utama rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah karena korupsi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran publik. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal akibat praktik korupsi, sehingga kualitas layanan publik menjadi menurun. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh manfaat maksimal dari program pembangunan yang dirancang pemerintah (Maichal dan Sugiyanto 2025). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun IPM Indonesia terus meningkat dan mencapai kisaran 73 pada tahun 2023, peningkatan tersebut masih tergolong lambat dan belum merata antar daerah. Hal ini diperkuat oleh laporan United Nations Development Programme yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk tingkat korupsi, berpengaruh terhadap capaian pembangunan manusia suatu negara.

3.2. Data Panel

Menggunakan data panel dari 68 negara antara tahun 2005 dan 2022, analisis ini menerapkan Fixed Effects, Random Effects, dan Feasible Generalized Least Squares (FGLS). Temuan yang paling mencolok adalah bahwa FDI memiliki efek negatif dan signifikan terhadap IPM di negara-negara dengan korupsi rendah—banyak di antaranya adalah negara maju—yang bertentangan dengan ekspektasi konvensional bahwa FDI mendorong pembangunan di bawah tata kelola yang baik. Hasil ini mungkin mencerminkan tantangan struktural seperti populasi yang menua, krisis pengungsi, dan guncangan geopolitik yang membatasi keuntungan pembangunan dari modal asing. Sebaliknya, FDI tidak menunjukkan

dampak signifikan di negara-negara dengan tingkat korupsi sedang dan tinggi, di mana institusi yang lemah mencegah manfaat investasi untuk dibagikan secara luas. Hasil lain menunjukkan bahwa ekspor secara konsisten meningkatkan HDI di semua tingkat korupsi, impor hanya berpengaruh di negara-negara dengan tingkat korupsi sedang, akses internet mendorong peningkatan di semua kelompok, dan pariwisata hanya memberikan kontribusi positif di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Implikasi praktisnya adalah bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi rendah harus menyelaraskan FDI dengan strategi demografi dan pasar tenaga kerja untuk memastikan hasil yang inklusif, sementara negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi dan sedang harus memperkuat institusi untuk membuka potensi FDI (Li, X., & Zhou, Y. 2025).

Meneliti dampak gabungan korupsi dan ketidaksetaraan ekonomi terhadap hasil kesehatan masyarakat di 136 negara dari tahun 2001 hingga 2020. Dengan menggunakan analisis regresi panel dengan efek tetap pada data dari Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, koefisien Gini pendapatan pasca-pajak dari World Inequality Database, dan indikator kesehatan dari Bank Dunia, studi ini mengungkapkan bahwa korupsi dan ketidaksetaraan secara independen memperburuk hasil kesehatan. Lebih penting lagi, interaksi keduanya memperparah dampak ini, menyoroti sinergi struktural yang membatasi akses ke sumber daya kesehatan penting dan secara tidak proporsional merugikan populasi yang sudah rentan. Korupsi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan pembangunan manusia, khususnya pada komponen kesehatan dalam IPM (Ortega, Casquero, dan Sanjuán 2014). Data empiris ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, semakin buruk kualitas kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan capaian IPM secara keseluruhan. Dengan demikian, secara ilmiah dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga secara langsung merusak dimensi dasar pembangunan manusia.

Korupsi berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia karena memperlambat peningkatan indikator pendidikan dan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Secara teoritis, dalam konsep *human development*, peningkatan kualitas hidup masyarakat harus terjadi secara berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif. Namun, praktik korupsi justru menghambat proses tersebut karena menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran publik. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2016 nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada angka **70,18**, yang baru masuk kategori “tinggi” dan masih menunjukkan adanya keterbatasan dalam kualitas pembangunan manusia.

3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Terus Mengalami Peningkatan

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan, data terbaru menunjukkan bahwa peningkatannya masih tergolong bertahap dan belum sepenuhnya merata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, IPM Indonesia pada tahun 2024 mencapai **75,02**, meningkat dari **74,39** pada tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2025, IPM kembali meningkat menjadi sekitar **75,90**. Namun, jika dilihat lebih dalam, peningkatan ini hanya sekitar **0,6–0,8 poin per tahun**, yang menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan manusia masih relatif lambat. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup besar antar daerah. Data menunjukkan bahwa IPM di wilayah maju seperti DKI Jakarta dapat mencapai lebih dari **84**, sementara di beberapa wilayah timur Indonesia masih berada di bawah **60–70**. Ketimpangan ini menandakan bahwa hasil pembangunan belum merata secara nasional. Dalam konteks ini, praktik korupsi berperan dalam memperlemah efektivitas distribusi anggaran, sehingga daerah tertentu tertinggal dalam pembangunan.

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Opini bahwa korupsi menjadi penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa IPM Indonesia pada tahun 2024 berada di angka **75,02**, hanya meningkat sekitar **0,63 poin dari tahun sebelumnya**. Kenaikan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat masih berjalan lambat. Dalam kondisi seperti ini, praktik korupsi membuat anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti fasilitas sekolah yang kurang memadai dan layanan kesehatan yang terbatas. Selain itu, data juga menunjukkan adanya ketimpangan, di mana rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 masih sekitar **8,85** tahun, yang berarti banyak masyarakat belum menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia belum merata.

Implikasinya, jika korupsi tidak dikendalikan, maka peningkatan IPM akan terus berjalan lambat dan tidak merata, sehingga memperbesar kesenjangan sosial antar daerah. Oleh karena itu, selain meningkatkan anggaran, pemerintah juga perlu memperkuat transparansi dan pengawasan agar pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup

masyarakat. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan manusia di Indonesia.

5. PENUTUP

Sebagai penutup, dapat ditegaskan kembali bahwa praktik korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan pembangunan manusia berjalan lebih lambat dan tidak merata, meskipun anggaran yang dikeluarkan terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah yang lebih komprehensif. Selain memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah perlu mendorong digitalisasi sistem pelayanan publik dan pengelolaan anggaran guna meminimalkan celah korupsi. Transparansi anggaran melalui akses data terbuka juga penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana publik. Di sisi lain, peningkatan kualitas birokrasi melalui sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis merit perlu diperkuat agar aparatur negara memiliki integritas yang tinggi. Edukasi antikorupsi juga harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal maupun kampanye sosial. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih luas dan efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama demi mendorong pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Sari, N. P., & Putra, I. M. (2019). Korupsi, indikator makro ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), 45–60. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/42031>
- Amalia, R., & Syafitri, Y. (2020). The effect of corruption and human development index on economic growth. *Journal of Islamic Economics and Business (JEBIS)*, 6(2), 120–135. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/20472>

- Pratama, A. (2023). Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 15(2), 85–98. <https://www.researchgate.net/publication/386265468>
- Putri, D. A., & Rahman, F. (2023). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 55–70. <https://www.researchgate.net/publication/386048025>
- Pratama, A. (2023). Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 15(2), 85–98. <https://www.researchgate.net/publication/386265468>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks pembangunan manusia Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Maichal, M., & Sugiyanto, F. X. (2025). Does globalization affect human development index? Evidence from high-corruption and low-corruption countries. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 26(2), 157–177. <https://doi.org/10.18196/jesp.v26i2.26439>
- Li, X., & Zhou, Y. (2025). Economic inequality and corruption as social determinants of health: An empirical analysis across 136 countries (2001–2020). *SSM - Health Outcomes*, 101686. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101686>
- Ortega, B., Casquero, A., & Sanjuán, J. (2014). Growth in human development: The role of corruption. *Journal of International Development*, 26(7), 974–998. <https://doi.org/10.1002/jid.2945>